

UPAYA PENANGGULANGAN PERMASALAHAN KEMISKINAN
EKONOMI DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF PEKERJA SOSIAL
(EFFORTS TO ALL OVER ECONOMIC POVERTY PROBLEMS IN
INDONESIA THROUGH SOCIAL WORKERS PERSPECTIVE)

Salsabilla Aurelia Pratiwi¹, Ghea
Cantika Noorsyarifa², Nurliana
Cipta Apsari³

^{1,2}Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Padjadjaran

³Pusat Studi CSR, Kewirausahaan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
FISIP Universitas Padjadjaran

Email : salsabila19009@mail.unpad.ac.id,
ghea19002@mail.unpad.ac.id,
nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

Article history

Received : 16 Juni 2022

Revised : -

Accepted : 4 Agustus 2022

*Corresponding author

Email : alfaiziwarrior48@gmail.com

No. doi: [10.24198/focus.v5i1.39965](https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965)

ABSTRACT

Poverty is a condition caused by a lack of resources that function to meet the needs of life and improve the welfare of a society. Poverty is an unsolved problem in Indonesia because there are many factors behind it. Poverty is divided into several groups, namely absolute poverty, relative poverty, cultural poverty and structural poverty. Background factors that cause the emergence of poverty problems include bad habits adopted by a community group and income inequality obtained by the community. To overcome poverty, efforts are needed from several parties such as policy makers and professionals, one of which is Social Workers. Social workers have a goal to empower the community, This is related to the research in writing this article on how efforts are being made to overcome poverty problems through the perspective of Social Workers. The purpose of writing this article is to conduct research on the current situation of poverty in Indonesia and the efforts that can be made to overcome the problem of poverty through the perspective of the social worker profession.

Keywords : *Poverty, Social Worker, Empowerment*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang diakibatkan oleh kekurangannya sumberdaya yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum terpecahkan di Indonesia karena terdapat banyak faktor yang melatarbelakanginya. Kemiskinan dibagi kedalam beberapa kelompok yakni diantaranya kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Faktor latar belakang yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan diantaranya kebiasaan buruk yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat dan ketimpangan pendapatan yang didapat oleh masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan perlu adanya upaya dari beberapa pihak seperti para pemangku kebijakan dan profesional salah satunya yakni Pekerja Sosial. Pekerja sosial memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat, hal tersebut berkaitan dengan penelitian dalam penulisan artikel ini mengenai bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui perspektif Pekerja Sosial. Penulisan artikel ini bertujuan

untuk melakukan penelitian mengenai situasi kemiskinan di Indonesia saat ini dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui perspektif profesi pekerja sosial.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pekerja Sosial, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan di negara berkembang khususnya Indonesia. Hari (2017) mengungkapkan bahwa kemiskinan dalam hal sosial-psikologis mengarah pada kekurangan jaringan serta struktur sosial yang dapat meningkatkan produktivitas. Dimensi kemiskinan merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat kesempatan yang terdapat di masyarakat. Faktor penghambat dalam hal ini yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti misalnya rendahnya pendidikan sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada dari luar diri seseorang, kedua faktor tersebut mempengaruhi akses bagi seseorang yang berada dalam kategori miskin untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraannya.

Sharp dalam Kuncoro (2004) menyatakan bahwa terdapat beberapa penyebab dari timbulnya masalah kemiskinan, yakni (1) Terdapatnya perbedaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan, (2) Terdapat perbedaan pada kualitas sumberdaya manusia, dan (3) Terdapatnya teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious Circle of Poverty). Upaya penanggulangan kemiskinan sudah sejak lama dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah dengan mengeluarkan beberapa program-program yang dapat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat. Program tersebut diantaranya yaitu Program Indonesia

Pintar (PIP) yang diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang diberikan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program-program lainnya yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin (Poluakan, 2019). Namun hal tersebut tentu tidak cukup untuk menanggulangi kemiskinan, mengingat kemiskinan tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi saja karena merupakan suatu permasalahan yang kompleks karena tidak hanya terkait dengan ekonomi, melainkan juga sisi lainnya seperti kesehatan, pendidikan, politik, kelembagaan dan sebagainya (Haris, 2018). Oleh karena itu, dalam proses penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada individual tetapi juga perlu memperhatikan segi kultural, dan struktural di masyarakat (Poluakan, 2019).

Pekerjaan sosial hadir sebagai sebuah profesi yang dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa black death yaitu kematian massal akibat suatu wabah penyakit di Inggris pada abad ke-14 yang berdampak pada kondisi masyarakat yang menjadi miskin (Sitepu, 2017). Oleh karena itu, pekerja sosial sangat terkait dengan masalah kemiskinan, karena pekerjaan sosial lahir dari adanya masalah kemiskinan (Ishartono dkk, 2016). Pekerja sosial menjadi tenaga terdepan dalam mengatasi masalah kemiskinan (Ishartono dkk, 2016). Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi a). Situasi Kemiskinan di Indonesia saat ini b). Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui perspektif Pekerja Sosial.

METODE

Penelitian dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan atau studi literatur. Menurut Achmadi (2005) penelitian studi literatur tidak diharuskan untuk secara langsung turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Pendekatan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data-data untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang diperoleh dari literatur, laporan-laporan, sumber pustaka atau dokumen. Tulisan ini dikembangkan dengan memperbanyak informasi dari berbagai sumber lalu membandingkannya dan membuat hasil atas data yang berhubungan dengan topik pembahasan.

Kumpulan informasi atau data yang terkait dengan topik pembahasan pada artikel ini bersumber dari Platform Google. Data yang digunakan untuk menjadi sumber referensi dalam penulisan artikel berasal dari jurnal mengenai upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia menggunakan salah satu perspektif pekerja sosial yaitu pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kemiskinan Di Indonesia

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan di negara berkembang khususnya di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai hingga 26,50 juta penduduk atau sebesar 9,71 persen. Dilansir dari laman web Kompas.com, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memberi prediksi bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami kenaikan dalam angka kemiskinan menjadi 29,3 juta penduduk atau sebesar 10,81 persen.

Menurut Friedman dalam Suharto (2014:134) Kemiskinan merupakan kondisi yang muncul diakibatkan oleh adanya kesempatan yang tidak merata dalam mengakumulasi dasar kekuatan sosial seperti:

Modal produktif

Aset (tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan)

Sumber-sumber keuangan (pendapatan serta kredit yang memadai)

Organisasi sosial dan politik (partai politik, koperasi, kelompok usaha, dan kelompok simpan pinjam)

Network atau jaringan sosial

Keterampilan dan informasi untuk mengembangkan hidup

Menurut Hari (2017) secara ekonomi, kemiskinan merupakan kondisi yang diakibatkan oleh kekurangannya sumberdaya yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, sumberdaya dalam hal ini berarti meliputi hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang luas. Sedangkan Andi (2018) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang dapat dilihat berdasarkan beberapa hal seperti rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dalam mutu pangan, minimnya akses layanan kesehatan yang dimiliki, kekurangan gizi serta buruknya kualitas layanan pendidikan yang diperoleh.

Fakir miskin merupakan suatu kelompok yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk diri sendiri maupun keluarganya (Hari, 2017). Kemiskinan adalah suatu masalah mengenai rendahnya kualitas hidup suatu penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, kurangnya pelayanan kesehatan, gizi anak serta buruknya kualitas atau mutu layanan pendidikan (Haris, 2018). Kemiskinan juga dapat memberikan dampak negatif, mulai dari munculnya tindakan kejahatan, pengangguran, dan berbagai bentuk kondisi kehidupan sosial ekonomi yang buruk. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kemiskinan dapat memicu munculnya beragam masalah sosial.

Di Indonesia, permasalahan kemiskinan memiliki sifat multidimensional yang berarti membutuhkan adanya penanganan berdasarkan beberapa aspek lain dari kemiskinan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hari (2017) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yakni terdiri dari dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Hal tersebut juga searah dengan pendapat Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2017:27) bahwa kemiskinan tidaklah hanya memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat melainkan juga berkaitan dengan permasalahan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), kurangnya peluang akses lapangan

pekerjaan bagi masyarakat, penghasilan yang habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tingginya angka ketergantungan, dan budaya kemiskinan yang diberikan oleh generasi sebelumnya dan masih diterapkan hingga saat ini. Kemiskinan dapat diukur melalui penetapan persediaan sumberdaya dengan penggunaan standar baku yang dapat disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*), cara tersebut dinamakan dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

Terdapat ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur mengenai indikator kemiskinan yang standar dalam PERMENSOS No. 146 Tahun 2013, yakni sebagai berikut:

1. Tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar
2. Penghasilan hanya dapat digunakan sebagian besar untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
3. Tidak memiliki akses untuk berobat ke tenaga medis terkecuali puskesmas atau mendapatkan subsidi dari pemerintah
4. Tidak mampu untuk membeli pakaian satu kali dalam jangka waktu satu tahun untuk setiap anggota keluarga atau rumah tangga
5. Hanya memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
6. Dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi yang tidak baik seperti tembok yang telah usang atau yang tidak diplester
7. Lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi yang tidak baik
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi yang tidak baik
9. Penerangan yang digunakan pada bangunan tempat tinggal bukanlah berasal dari listrik atau dari listrik tanpa meteran
10. Luas lantai rumah kurang dari 8 m²/orang
11. Sumber air minum yang dimiliki berasal dari sumur atau mata air yang tak terlindung seperti sungai, air hujan, dll.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kemiskinan merupakan ketidakmampuan suatu masyarakat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan yang terukur berdasarkan sisi pengeluaran, sedangkan penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Terdapat 14 Kriteria Miskin menurut Standar Badan Pusat Statistik, diantaranya:

1. Luas lantai bangunan pada tempat tinggal berukuran kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai pada tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu dengan biaya atau harga yang murah
3. Jenis dinding pada tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu dengan kualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau dilakukan secara bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga masih tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak makanan sehari-hari yakni menggunakan kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya mampu makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yakni tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/

non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang termasuk ke dalam patologi sosial dan dapat menyebabkan terbentuknya perilaku anti sosial serta kriminalitas terhadap seseorang seperti aksi kejahatan hingga pengangguran dan kondisi kehidupan sosial ekonomi yang buruk lainnya (Andi, 2018).

Munculnya permasalahan kemiskinan tentunya tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Jamasy (2004) menyatakan bahwa kemiskinan dibagi menjadi dua kelompok dilihat dari penyebabnya, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh terdapatnya kultur, budaya atau kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat berupa kebiasaan masyarakat dalam cara berpikir masyarakat yang kurang rasional serta merasa cepat puas dengan sesuatu yang telah dicapai sehingga menyebabkan timbulnya sifat malas. Kemiskinan kultural merupakan kondisi kelompok masyarakat dimana menurut kelompok masyarakat lainnya sudah termasuk kedalam kategori miskin atau sangat miskin namun kelompok masyarakat ini tidak merasa memiliki masalah dengan keadaan yang mereka hadapi sehingga menyebabkan sulitnya menanggulangi permasalahan kemiskinan pada kelompok yang masuk ke dalam kemiskinan kultural ini.

Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh terdapatnya kebijakan pembangunan yang belum merata bagi seluruh masyarakat sehingga munculnya permasalahan ketimpangan pendapatan pada suatu kelompok masyarakat. Kelompok kemiskinan ini diakibatkan oleh sistem dan struktur sosial yang tidak menyediakan kesempatan atau lapangan pekerjaan yang memungkinkan masyarakat dalam kategori miskin untuk dapat bekerja. Penduduk yang termasuk kedalam kelompok ini umumnya yakni bekerja sebagai buruh tani, pemulung, penggali pasir serta orang-orang yang tidak terpelajar atau terlatih. Pemerintah memiliki peranan besar dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan dalam kelompok kemiskinan struktural dikarenakan dalam

menyelesaikan permasalahan kemiskinan pada kelompok ini butuh adanya seseorang yang memiliki kekuasaan dan mampu untuk menciptakan kebijakan yang pro terhadap masyarakat miskin. Hal ini berkaitan juga dengan salah satu penyebab permasalahan kemiskinan di Indonesia, yakni terdapatnya kebijakan ekonomi dan politik yang tidak memberikan keuntungan pada masyarakat yang tergolong kedalam penduduk miskin sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan akses sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak.

Chambers dalam Khomsan, dkk (2015:3-4) juga menyatakan terdapat empat faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kemiskinan:

Kemiskinan absolut, kemiskinan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dimana pendapatan mereka berada pada bawah garis kemiskinan sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti sandang, pangan dan papan serta kesehatan dan pendidikan yang mana hal tersebut dibutuhkan mereka untuk melakukan kegiatan bekerja dan melanjutkan hidup.

Kemiskinan relatif, kemiskinan yang diakibatkan oleh terdapatnya ketimpangan pendapatan, namun kelompok masyarakat pada kategori ini masih tergolong memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan namun mereka cenderung masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitar mereka.

Kemiskinan kultural, kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya faktor budaya atau kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat, yang mana mereka tidak mau untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka seperti misalnya malas dan boros.

Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh kurangnya akses bagi suatu kelompok masyarakat untuk memperoleh sumber daya yang terdapat dalam sistem sosial budaya politik hingga tidak mendukung adanya pembebasan serta pengentasan kemiskinan.

Perkembangan yang terjadi pada masa kini menyebabkan kegiatan pembangunan pada suatu wilayah tidak dapat dihindari terutama di wilayah perkotaan, hal tersebut menjadi salah satu penyebab termarginalisasikannya masyarakat kurang mampu atau miskin yang

tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup atau memadai (Haris, 2018).

Sulistiyani (2017) menyatakan bahwa telah terjadi perubahan morfologis pada wilayah perkotaan, hal tersebut ditandai dengan terdapatnya perbedaan kondisi wilayah perkotaan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan maraknya pembangunan fasilitas-fasilitas kota serta terdapatnya pergeseran fungsi produksi yang semula merupakan basis pertanian hingga terjadi pergeseran menuju industry (Haris, 2018).

Permasalahan kemiskinan menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), para profesional serta masyarakat untuk segera ditanggulangi, hal tersebut juga berkaitan dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Profesi Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan suatu profesi yang melakukan praktik dengan berlandaskan disiplin akademik dan berusaha membantu menciptakan perubahan sosial yang lebih baik seperti melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial (Sitepu, 2017). Pekerja sosial juga dapat diartikan sebagai tenaga terdidik dan terlatih secara profesional untuk terlibat dalam membantu mengatasi berbagai masalah sosial (Fajar dkk, 2017). Pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu menciptakan kondisi keberfungsian sosial yang baik (Haris, 2018). Kemudian pekerja sosial dapat didefinisikan sebagai praktik untuk membantu memberikan pelayanan pada individu maupun kelompok yang membutuhkan (Sitepu, 2017).

Pekerja sosial berusaha membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya seperti masyarakat yang tertindas dan mengalami kemiskinan (Sitepu, 2017). Dalam praktiknya, profesi pekerjaan sosial tentu didukung dengan teori-teori praktik pekerjaan sosial dan pengetahuan mengenai masyarakat (Sitepu, 2017). Pekerja sosial sangat berprinsip pada keadilan sosial dan menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) (Sitepu, 2017). Adapun tujuan dari pekerja sosial menurut Sitepu (2017) yaitu terciptanya keadilan sosial maupun ekonomi

melalui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dengan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Profesi pekerja sosial membantu meningkatkan kesejahteraan sosial pada individu maupun masyarakat yang rentan, tertindas, dan miskin (Sitepu, 2017). Tujuan pekerjaan sosial lainnya menurut Fajar dkk (2017) yaitu : 1). Meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah, 2). Memperoleh dan memanfaatkan sumber atau potensi, 3). Menciptakan organisasi sosial yang responsif dalam memberikan pelayanan, 4). Memfasilitasi interaksi individu atau kelompok dengan lingkungannya, 5). Terlibat interaksi dengan organisasi dan institusi 6). Mempengaruhi suatu kebijakan sosial.

Menurut Fajar dkk (2017) pekerjaan sosial memiliki fungsi-fungsi diantaranya yaitu : 1). Mendorong suatu perubahan sosial, 2). Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan, 3). Menciptakan pemberdayaan dan pembebasan, 4). Mencapai suatu kesejahteraan, yang didasarkan pada teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial yang berkaitan dengan interaksi manusia serta lingkungannya. Kemudian menurut Pincus dan Minahan 1973 : dalam Haris, 2018) pekerja sosial dalam mencapai tujuannya untuk memecahkan masalah perlu melaksanakan beberapa fungsi berikut yaitu :

a). Meningkatkan kemampuan individu untuk berusaha menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah, fungsi tersebut dilakukan dengan :

1). Mengidentifikasi dan membuat kontrak dengan orang yang memerlukan bantuan pertolongan,

2). Memberikan pemahaman dan dukungan terhadap orang yang mengalami krisis

3). Memberikan orang kesempatan untuk bercerita mengenai kesulitan yang dihadapi dalam mengatasi masalahnya,

4). Membantu menentukan beberapa solusi alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah,

5). Mengkonfortasikan orang agar dapat menimbulkan motivasi untuk membuat perubahan,

6). Mengajarkan keterampilan yang dapat membantu orang untuk melaksanakan fungsi dan tugas-tugas kehidupannya dengan baik.

b). Mengaitkan orang dengan sistem sumber yang dimiliki, hal tersebut dapat dilakukan dengan :

- 1). Mengidentifikasi orang yang tidak mampu memanfaatkan sistem sumber,
- 2). Memberikan informasi yang bermanfaat mengenai sistem sumber pada orang yang memiliki hak untuk membutuhkan sistem sumber tersebut,
- 3). Memanfaatkan sistem sumber untuk mengatasi masalah-masalah praktis,
- 4). Membantu orang untuk menemukan dan memperoleh sistem sumber,
- 5). Bertindak sebagai advokat bagi orang yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sistem sumber,
- 6). Bertindak sebagai advokat guna memberikan informasi stimulasi pada sistem sumber agar dapat memberikan pelayanan,
- 7). Membantu orang untuk bertindak sebagai sumber yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah.

c). Memfasilitasi interaksi antar sistem sumber, fungsi tersebut dilakukan oleh pekerja sosial dengan :

- 1). Memberikan informasi pada sistem sumber mengenai suatu permasalahan,
- 2). Memberikan pelayanan sebagai konsultan pada sistem kemasyarakatan serta dapat memberikan saran mengenai metode pelayanan yang mungkin berbeda,
- 3). Mengkonsultasikan sistem informal yang dapat digunakan untuk membantu memberikan pelayanan dari sistem sumber kemasyarakatan,
- 4). Melibatkan individu lain dalam sistem sumber kemasyarakatan maupun mengaitkannya agar dapat membantu merancang pendekatan yang sesuai dengan keluarga maupun individu,
- 5). Bertindak sebagai advokat,
- 6). Mengorganisasikan orang untuk terlibat dalam organisasi,
- 7). Menengahi maupun memecahkan konflik dan permasalahan antara anggota organisasi, sistem sumber informal maupun sistem sumber kemasyarakatan.

d). Memberikan fasilitas dalam sistem sumber, fungsi tersebut dilakukan dengan :

- 1). Berbagi informasi dengan sistem-sistem sumber informal,

2). Dapat bersikap netral maupun menjadi advokat untuk memihak kepentingan yang tidak atau kurang memiliki kekuatan dan kemampuan menentukan keputusan dalam sistem sumber,

3). Membantu mengorganisasi dan mengubah bagian-bagian dalam sistem sumber,

4). Menjadi konsultan untuk membantu menjelaskan permasalahan yang dialami serta menyarankan tindakan perubahan yang dapat dilakukan,

5). Melatih anggota-anggota dalam sistem untuk dapat menjalankan peranannya dengan baik,

6). Menambahkan anggota baru dalam sistem maupun meningkatkan fungsionalitas anggota lainnya,

7). Melibatkan anggota-anggota sistem dalam mendeteksi suatu permasalahan dengan melakukan diskusi.

Berdasarkan hal tersebut maka fokus rumusan masalah yang harus diperhatikan yaitu: a). Bagaimana tantangan pekerja sosial dalam menangani kemiskinan, b). Bagaimana perspektif pekerja sosial dalam menangani kemiskinan (Haris, 2018).

Upaya Pekerja Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

Peran pekerjaan sosial dalam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan dengan mengubah perspektif atau cara pandang terhadap orang miskin bahwa mereka memiliki potensi yang dapat digunakan untuk terbebas dari kemiskinan, kemudian juga pekerja sosial dapat terlibat langsung menjadi pendamping di suatu program-program penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh pemerintah, salah satunya seperti PKH (Program Keluarga Harapan) (Poluakan dkk, 2019). Menurut Sitepu (2017) pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak hanya berfokus pada kondisi individunya saja melainkan juga berusaha mengintervensi kondisi lingkungannya, karena lingkungan tidak dapat terlepas dari masyarakat miskin. Menurutnya juga intervensi pada lingkungan juga sebagai bentuk untuk memperbaiki keberfungsian pada individu nantinya. Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam membantu mengatasi masalah kemiskinan masyarakat yaitu dengan berusaha meningkatkan keberfungsian sosial masyarakatnya (Haris, 2018). Keberfungsian sosial merupakan kemampuan individu dalam

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pada diri dan keluarganya serta kemampuan untuk terlibat secara positif dilingkungan masyarakat (Sitepu, 2017).

Adapun penanganan kemiskinan oleh pekerja sosial diarahkan untuk mewujudkan perubahan yang berfokus pada tiga hal, yaitu : 1). Individu dengan lingkungan sosial, 2). Lingkungan dan pengaruhnya pada individu, 3). Interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yaitu menciptakan pemberdayaan masyarakat dan melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sebuah jalan kekuatan bagi masyarakat yang tidak berdaya atau miskin memiliki kemampuan untuk bangkit (Poluakan, 2019).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya partisipatif dari masyarakat agar terlibat dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup dari berbagai aspek (Mardikanto, 2010 : 73, dalam Manopo dkk, 2021). Tujuan pemberdayaan adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri (Anggraini dkk, 2021). Kemandirian dalam konsep pemberdayaan diartikan bahwa masyarakat mampu berpikir, dan bertindak dengan tepat (Anggraini dkk, 2021). Selain itu juga menurut Sumaryadi (2005, dalam Susanto dkk, 2021) mengemukakan tujuan dari pemberdayaan diantaranya yaitu : 1). Mengembangkan kapasitas masyarakat yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan, 2). Memberdayakan berbagai aspek kehidupan kelompok rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Shardlow (1998:32) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan kondisi dimana individu, kelompok dan komunitas berupaya untuk mengendalikan hidup seseorang guna mencapai masa depan yang sesuai dengan harapan mereka. Berdasarkan pendapat Shardlow, Biestek (1961) memiliki pendapat yang berkaitan yakni bahwa Ilmu Kesejahteraan Sosial yakni dapat dikatakan dengan namanya adalah "penentuan nasib sendiri", prinsip tersebut mendorong klien untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dengan memahami permasalahan yang sedang dihadapi serta mencari solusi atau upaya yang tepat dalam mengatasi permasalahannya sehingga dengan begitu mereka memiliki kesadaran

penuh terhadap masa depan yang diinginkannya. Tujuan utama dari pemberdayaan yakni untuk mempererat dan memperkuat komunitas khususnya bagi mereka yang tidak berdaya karena disebabkan oleh keadaan internal maupun kondisi eksternal (Perwiranegara, 2021).

Pembangunan berbasis pendekatan partisipatif yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri dapat membantu mengurangi kemiskinan yang terjadi (Sumaryadi, 2005 dalam Manopo dkk, 2021). Pemberdayaan masyarakat termasuk dalam pembangunan yang berbasis pada pendekatan partisipatif, dikarenakan hal tersebut dapat membantu meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan yang diharapkan dilingkungan masyarakat salah satunya terbebas dari kemiskinan. Masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam setiap upaya penanggulangan kemiskinan (Haris, 2018).

Pemberdayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan juga melibatkan suatu profesi berbasis praktik yang dapat membantu merealisasikan proses pemberdayaan dimasyarakat, profesi tersebut yaitu pekerjaan sosial (Abdiansyah, 2021). Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses pemberdayaan guna mengatasi masalah kemiskinan menurut Schwartz (dalam Suharto, 2009 dalam Haris, 2018) diantaranya yaitu : 1). Mencari dan menentukan persamaan mengenai kebutuhan mendasar mereka serta tuntutan sosial yang dihadapi, 2). Mengidentifikasi kesulitan yang menghambat kepentingan mereka serta kepentingan orang yang mungkin berpengaruh pada mereka, 3). Berkontribusi dalam memberikan ide, nilai, dan konsep yang dapat membantu masyarakat menghadapi realitas serta membantu menyelesaikan masalahnya, 4). Membagikan visi mengenai harapan dan keterlibatan pekerja sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat, 5). Mengidentifikasi syarat-syarat serta batasan antara pekerja sosial dengan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perwiranegara (2021) dalam artikel yang berjudul "PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN BANGSA INDONESIA DALAM PENDEKATAN

PEKERJA SOSIAL”, dijelaskan bahwa terdapat strategi dasar dalam melakukan pemberdayaan dan pendekatan pemberdayaan, diantaranya yakni:

a. Pengembangan masyarakat lokal

Pengembangan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan membahas strategi transformasi bersama-sama dengan adanya partisipasi warga sebanyak mungkin agar dapat menentukan masalah yang sedang mereka hadapi serta solusi yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut.

b. Rencana Sosial

Perencanaan yang disiapkan dilandasi oleh tujuan yang ingin dicapai dengan mengumpulkan berbagai fakta serta melakukan aktivitas yang telah tersusun secara sistematis.

c. Aksi Sosial

Menyadarkan masyarakat terkait permasalahan yang sedang dihadapi dan melakukan tindakan untuk menanggulangi permasalahan yang sedang dihadapi tersebut secara mandiri. Dalam melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat tentunya membutuhkan rencana komprehensif, rencana komprehensif memiliki beberapa elemen seperti berkaitan dengan masa depan, melakukan rangkaian kegiatan secara sistematis dan memiliki tujuan untuk mewujudkan harapan dengan melihat kondisi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang (Perwiranegara, 2021).

Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan menurut Perwiranegara (2021) yaitu :

1. Pemberdayaan

Merupakan upaya memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk membantu membebaskan masyarakat dari hambatan budaya struktural

2. Memperkuat

Memperkuat pengetahuan serta potensi masyarakat dengan mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mencari upaya pemecahan masalah serta melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahannya.

3. Perlindungan

Memberi perlindungan bagi masyarakat khususnya kelompok rentan terhadap penindasan yang dilakukan oleh kelompok kuat

dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan tindakan diskriminasi di lingkungan masyarakat.

4. Dukungan

Memberikan dukungan bagi masyarakat yang menjalankan peran agar mereka tidak terjerumus dalam keadaan yang rentan.

5. Pemeliharaan

Menjaga kondisi keseimbangan distribusi kekuasaan di antara semua kelas masyarakat.

Debois dan Miley (1992:211) menyampaikan beberapa metode atau teknik yang dapat dilakukan oleh profesi pekerjaan sosial dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yakni:

- 1). Membangun hubungan saling bantu membantu dengan masyarakat,
- 2). Menjalin komunikasi yang baik dengan menghormati martabat klien serta fokus dan menjaga kerahasiaan klien,
- 3). Memiliki komitmen untuk memecahkan masalah,
- 4). Tetap berpegang teguh serta merefleksikan sikap dan nilai dari profesi pekerjaan sosial dengan memperhatikan kode etik, berpartisipasi dalam pengembangan profesi, dan menghapus berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dapat disebabkan oleh banyak faktor. Kemiskinan dapat menghambat seseorang untuk memperoleh hak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak dulu dengan melibatkan banyak pihak, pemerintah misalnya mengeluarkan beberapa program yang khusus ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan dapat memperoleh hak-hak nya dengan mudah melalui program-program tersebut. Dalam konteks pekerjaan sosial upaya penanggulangan masyarakat miskin yaitu dengan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Keberfungsian sosial ini terkait dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan akses pada lingkungan sosialnya. Pekerja sosial berusaha membantu menangani masyarakat miskin dengan membangun kemandirian mereka yang didasarkan pada potensi dan sumber daya yang

dimiliki baik pada individu maupun lingkungannya.

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pekerja sosial perlu melibatkan masyarakat secara luas, hal ini karena pekerja sosial memandang suatu masalah tidak hanya dari faktor individu saja melainkan juga masyarakat serta lingkungannya sehingga dalam menentukan suatu solusi, pekerja sosial perlu melibatkan aspek-aspek lainnya. Upaya yang melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat akan mendapat pendampingan dari pekerja sosial. Melalui adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka secara mandiri dan perlahan terbebas dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansyah, T. (2021). PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN BANGSA INDONESIA DALAM PENDEKATAN PEKERJA SOSIAL. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 1(1), 50-60.
- Anggraini, Deri Firma., Saefulrahman., Sagita, Novie Indrawati.(2021).Implementasi Fungsi Pemerintahan Dalam Penanganan Masalah Penyandang Disabilitas di Kota Padang Panjang.*Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*.Vol 1 (2) : 184 - 194
- Baharuddin, B. (2020). MEMBUMIKAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (SEBUAH REFLEKSI). *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 49-55.
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117-126.
- Haris, A. M. A. (2018). Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Hatu, Rauf A.(2010).Pemberdayaan dan

- Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis).*Jurnal Inovasi*. 7(4) : 240 - 254
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *MBIA*, 18(3), 49-66.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Manopo, Tesalonika., Singkoh, Frans., Kasenda, Ventje.(2021).Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Kecamatan Langowan Timur).*Jurnal Governance*.Vol 1 (2) : 1 - 9
- Mujiyadi, B. (2012). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PINGGIRAN KOTA Studi Pekerjaan Sosial tentang Petani Penggarap di Lahan Sementara. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 192-204.
- Poluakan, M. V., Nurwati, Nunung.(2019).Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural di Indonesia.*Jurnal Sosio Informa*. 5 (03): 177-188
- Poluakan, M. V., Raharjo, Santoso T., Nurwati, Nunung.(2020).Strengths-Perpective Sebagai Penguat Dalam Pengembangan Kebijakan Sosial Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.*Jurnal Sosio Informa*. 6 (01) : 63-75
- Ras, A. A. (2013). Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan. *PERENNIAL*, 56-63.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Sitepu, Anwar.(2017).Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial.*Jurnal Sosio Informa*. 3 (1) : 70-87
- Susantyo. B., Nainggolan, T.(2018).Integrasi

Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Program Keluarga Harapan. *Jurnal
Ilmiah Kesejahteraan Sosial*. 14 (26) : 73-84

Susanto, Djoko., Yanuarita, Heylen

Amildha. (2021). Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas Oleh Dinas
Sosial Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Sosial
dan Pendidikan*. Vol 5 (4) : 1300 - 1310